

2020

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2021

*Dinas Sosial  
Kabupaten Magetan*



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas yaitu Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 disusun sebagai implementasi tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 disusun dalam upaya memberikan arahan/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Magetan selama tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena didalamnya memuat berbagai informasi, data, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan kegiatan prioritas berdasarkan review / hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini dengan harapan dalam pelaksanaannya nanti diberikan kelancaran dan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, kami berharap agar Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini dapat dijadikan paduan serta acuan bagi seluruh aparat di Dinas Sosial Kabupaten Magetan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam upaya pelayanan prima kepada masyarakat.

Magetan, Agustus 2020

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Magetan

YAYUK SRI RAHAYU, SE  
Pembina  
NIP. 19680508 199302 2 003

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....  | i   |
| KATA PENGANTAR .....   | ii  |
| DAFTAR ISI .....   | iii |
|  |     |
| BAB I   PENDAHULUAN  |     |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan .....  | 3   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | 5   |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | 5   |
|  |     |
| BAB II   HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  |     |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....<br>Dan Capaian Rentra Perangkat Daerah | 9   |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....   | 23  |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas .....  | 26  |
| Dan Fungsi Perangkat Daerah  |     |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....  | 29  |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....  | 37  |
|  |     |
| BAB III   TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  |     |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....   | 38  |
| dan Provinsi   |     |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....   | 40  |
| 3.3 Program dan Kegiatan.....  | 42  |
|  |     |
| BAB IV   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....   | 45  |
| BAB V   PENUTUP.....   | 49  |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Permasalahan sosial merupakan sebuah masalah yang cara menyelesaikannya tidak cukup dengan penanganan sekali ataupun setahun – dua tahun. Penyelesaian masalah ini memerlukan penanganan yang berkali-kali dan dampak perubahannya akan dirasakan beberapa tahun setelahnya, berbeda dengan pembangunan fisik yang dampaknya bisa langsung dirasakan. Ini menjadi tantangan nyata dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai adanya perubahan paradigma pembangunan yang bergeser ke arah desentralistik dalam suasana otonomi daerah yang memberikan peran lebih besar kepada daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaku utama pembangunan serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun disatu sisi, pelaksanaan otonomi tidak sepenuhnya berjalan mulus dengan ditemuinya dampak negatif yang berakibat pada peningkatan kualitas persoalan dalam layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan dengan berbagai problematikanya, meningkatnya pengangguran seiring dengan semakin menyempitnya peluang kerja serta akses lainnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi 7 (tujuh) fokus permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Semangat Tat Twam Asi (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses memanusiakan manusia sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya. Dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program yang mendukung Terwujudnya Kesejahteraan Sosial.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang stimulan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja SKPD merupakan penjabaran dan mempunyai hubungan yang selaras dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, RKA SKPD, KUA, PPAS dan RAPBD.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2021 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan.**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12 )
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89)
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

16. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan.
17. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Magetan Tahun 2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah terkait dengan Urusan bidang Pembangunan Sosial Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang terukur.
5. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



#### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Renja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BABI. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang disusunnya Renja SKPD tahun 2021  
Berisi pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, Renja K/L, Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan  
Uraian ringkas tentang landasan hukum yang berkaitan langsung dengan SOTK dan kewenangan dan yang berkaitan langsung digunakan dasar dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional maupun lokal
- 1.3 Maksud dan Tujuan  
Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja
- 1.4 Sistematika penulisan  
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT**

###### **DAERAH TAHUN LALU.**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan renja Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020, dikaitkan dengan target capaian renstra ( Monev tribulan II th 2020 )

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).

( Bab 7 Renstra ) aplikasi TC-25 kondisi tahun 2018-2023

## 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Berisi sejauh permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta isu-isu strategis lainnya.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para masyarakat, dan pengumpulan informasi dan pengamatan lapangan.

# BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021

## BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Memberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya.

## BAB IV. PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Secara umum, target Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Sosial dapat tercapai pada akhir tahun RPJMD, yaitu tahun 2023. Untuk capaian tahun 2019 ada satu indikator yang belum mencapai target, yaitu cakupan PMKS yang memperoleh pemberdayaan social melalui KUBE atau kelompok social ekonomi sejenis.

Adapun realisasi program dan kegiatan dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
  - Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah
  - Survey kepuasan masyarakat
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oiperasional
  - Pengadaan perlengkapan kantor
  - Pemeliharaan perlengkapan kantor
  - Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
  - Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
  - Pendataan PMKS

- Pemberdayaan Fakir Miskin
  - Pendamping Bantuan Sosial Pangan
  - Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial (DAK)
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak
  - Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.
  - Pelayanan psikosial bagi PMKS di rumah singgah
  - Penanganan lanjut usia terlantar
  - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit social
  - Pelayanan kesehatan bagi PMKS
  - Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesos masyarakat
  - Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan masyarakat
  - Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
  - Pemeliharaan taman makam pahlawan
  - Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
8. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
- Kesiapsiagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat
  - Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana
9. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
- Pendampingan operasional Program Keluarga Harapan (PKH)
  - Penanganan dan perlindungan social bagi orang terlantar
  - Pengadaan bahan makananan untuk PMKS
  - Pengadaan cadangan Gudang untuk pemenuhan social bagi korban bencana
  - Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

## 10. Program Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial

- Peningkatan kualitas pelayanan hibah kepada Lembaga Keagamaan dan tempat ibadah.

Tercapai atau tidaknya kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari target yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran Kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

### A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

### B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja urusan sosial tahun 2019. Capaian kinerja urusan sosial diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2. Persentase PMKS yang memperoleh program pemberdayaan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya
3. Persentase korban bencana alam yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
4. Persentase korban bencana alam yang memperoleh bantuan sosial selama masa tanggap darurat
5. Jumlah sarana peribadatan yang ditingkatkan
6. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Selanjutnya capaian kinerja urusan sosial tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan s/d Tahun 2019  
Kabupaten Magetan

Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Magetan

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                                       | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluarah kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2019) |                            |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan          |  |
|---------------|---|--|---|---|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
|               |   |  |   |   | Target Renja Tahun 2019   | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
|               | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>             | <b>Indeks kepuasan masyarakat    indeks</b>                                |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran        | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia    %               | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %                      | 100                   | 100 %  | 100 %  | 100 %  |
|               | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah              | Jumlah pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia    % | 12 bln  | 12 bln  | 12 bln  | 12 bln                     | 100                   | 12 bln   | 12 bln   | 12 bln                                       |
|               | Survey Kepuasan Masyarakat                                    | Jumlah ketersediaan dokumen IKM    Dokumen                                 | 1 dok   | 1 dok   | 1 dok   | 1 dok                      | 100                   | 1 dok  | 1 dok  | 1 dok  |
|               | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>      | <b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi    unit</b>  |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | Pengadaan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah perlengkapan kantor yang bertambah    unit                          | 15 unit   | 15 unit   | 15 unit   | 15 unit                    | 100                   | 15 unit  | 15 unit  | 15 unit                                      |
|               | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional        | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara    %                   | 12 unit   | 12 unit   | 12 unit   | 12 unit                    | 100                   | 12 unit  | 12 unit  | 12 unit                                      |



| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program / Kegiatan  | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluarah kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2019) |                            |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan          |  |
|---------------|---|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
|               |   |   |   |   | Target Renja Tahun 2019   | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
|               |   |   |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor   | Jumlah gedung kantor yang terpelihara / direhab   | 3 unit  | 3 unit  | 3 unit  | 3 unit                     | 100                   | 3 unit   | 3 unit   | 3 unit                                       |
|               | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>Persentase aparatur yang memiliki kompetensi     %</b>   |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | Pendidikan dan pelatihan formal   | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal     Orang   | 5 org   | 5 org   | 5 org   | 5 org                      | 100                   | 5 org  | 5 org  | 5 org  |
|               | <b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku     %</b> |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah     | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tersedia %                                      | 11 dok  | 11 dok  | 11 dok  | 11 dok                     | 100                   | 11 dok   | 11 dok   | 11 dok                                       |
|               | <b>Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</b>                        | <b>Cakupan bantuan keluarga miskin</b>  |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin                   | Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sembako  | 1.180 KK  | 1.180 KK  | 1.180 KK  | 1.180 KK                   | 100                   | 1.180 KK                                       | 1.180 KK   | 1.180 KK                                     |
|               | Pemberdayaan Fakir Miskin   | Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan KUBE   | 1 dok   | 1 dok   | 1 dok   | 1 dok                      | 100                   | 1 dok  | 1 dok  | 1 dok  |
|               |   | Cakupan pelayanan sosial bagi PMKS  | 0   | 30 kube   | 15 kube   | 15 kube                    | 100                   | 0  | 0 Kube   | 80   |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program / Kegiatan  | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluarah kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2019) |                            |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan          |  |
|---------------|---|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
|               |   |   |   |   | Target Renja Tahun 2019   | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
|               | <b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>  | <b>Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan</b>   |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana   | Jumlah PMKS khususnya gelandangan dan pengemis yang terfasilitasi    %                          | 70 klien  | 70 klien  | 70 klien  | 70 klien                   | 100                   | 70 klien                                       | 70 klien   | 70 klien                                     |
|               | Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan  | 130 anak  | 130 anak  | 130 anak  | 130 anak                   | 100                   | 130 anak                                       | 130 anak   | 130 anak                                     |
|               | Penanganan Lanjut Usia Terlantar  | Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial baik di dalam panti dan di luar panti    % | 200 orang   | 200 orang   | 200 orang   | 200 orang                  | 100                   | 200 orang                                      | 200 orang  | 200 orang                                    |
|               | Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial  | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang tertangani   | 60 org  | 60 org  | 60 org  | 60 org                     | 100                   | 60 org   | 60 org   | 60 org                                       |
|               | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma   | Jumlah penyandang cacat mampu latih yang mendapatkan pelatihan ketrampilan                      | 20 klien  | 20 klien  | 20 klien  | 20 klien                   | 100                   | 20 klien                                       | 20 klien   | 20 klien                                     |
|               | <b>Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</b>  | <b>Jumlah potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapat bimbingan dan pelatihan</b>  |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat                                    | Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan   | 1 kegt  | 1 kegt  | 1 kegt  | 1 kegt                     | 100                   | 1 kegt   | 1 kegt   | 1 kegt                                       |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan              | Indikator Kinerja Program / Kegiatan   | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluarah kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2019) |                            |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan          |  |
|---------------|--|--|---|---|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
|               |  |  |   |   | Target Renja Tahun 2019   | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
|               | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat                   | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapat bimtek | 90 org  | 90 org  | 90 org  | 90 org                     | 100                   | 90 org   | 90 org   | 90 org                                       |
|               | Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial                         | Jumlah Karang Taruna dan Karang Werdha yang mendapat bimtek  |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan  | Jumlah Taman Makam Pahlawan Yudonegoro yang terpelihara    %   | 12 bln  | 12 bln  | 12 bln  | 12 bln                     | 100                   | 12 bln   | 12 bln   | 12 bln                                       |
|               | Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial | Jumlah bantuan kepada fakir miskin di sekitar makam leluhur dan monument Soco                                | 650 org   | 650 org   | 650 org   | 650 org                    | 100                   | 650 org  | 650 org  | 650 org                                      |
|               | <b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>                         | <b>Prosentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan sunatan masal</b>                                      |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | Pelayanan Sunatan Masal  | Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan sunatan masal   | 180 anak  | 180 anak  | 180 anak  | 180 anak                   | 100                   | 180 anak                                       | 180 anak   | 180 anak                                     |
|               |  | Cakupan pelayanan sosial bagi korban bencana   |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | <b>Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</b>                  | <b>Presentase korban bencana yang mendapat perlindungan sosial    %</b>                                      |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat                   | Jumlah peserta yang mendapatkan Pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat    kali                 | 1 kegt  | 1 kegt  | 1 kegt  | 1 kegt                     | 100                   | 1 kegt   | 1 kegt   | 1 kegt                                       |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program / Kegiatan  | Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluarah kegiatan s/d tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2019) |                            |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan          |  |
|---------------|--|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
|               |  |   |   |   | Target Renja Tahun 2019   | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
|               | Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana                                 | Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan Bantuan    %                                 | 100 KK  | 100 KK  | 100 KK  | 100 KK                     | 100                   | 100 KK   | 100 KK   | 100 KK                                       |
|               | <b>Program Bantuan dan Perlindungan Sosial</b>                                       | <b>Persentase rumahtangga/individu sasaran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial    %</b> |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)                              | Jumlah pendamping PKH yang kinerjanya meningkat   | 18 kec  | 18 kec  | 18 kec  | 18 kec                     | 100                   | 18 kec   | 18 kec   | 18 kec                                       |
|               | Pendampingan Operasional Bantuan Sosial Pangan                                       | Jumlah KPM / Desa / Kelurahan yang mendapatkan bantuan sosial pangan / BPNT    %                  | 700 kpm   | 700 kpm   | 700 kpm   | 700 kpm                    | 100                   | 700 kpm  | 700 kpm  | 700 kpm                                      |
|               | Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar                              | Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang terfasilitasi    %                                | 60 org  | 60 org  | 60 org  | 60 org                     | 100                   | 60 org   | 60 org   | 60 org                                       |
|               | Meningkatnya kualitas lembaga sosial dan keagamaan                                   | Persentase lembaga sosial dan keagamaan yang meningkat aktifitasnya                               |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | <b>Program Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial</b>                        | <b>Persentase sarana peribadatan yang ditingkatkan</b>  |   |   |   |                            |                       |  |  |  |
|               | Peningkatan Kualitas Pelayanan Hibah Kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan | Jumlah Lembaga keagamaan dan tempat ibadah yang mendapat bantuan                                  | 150 lembaga                                       | 96 lembaga  | 150 lembaga   | 96 lembaga                 | 77                    | 150 lembaga                                    | 96 lembaga   | 96 lembaga                                   |

1. Persentase Cakupan Pelayanan Sosial Bagi PMKS

PERIODE TAHUN 2018-2023

| No | Indikator                          | Baseline<br>(2018) | Capaian Kinerja Tahun |      |      |      | Target<br>Akhir<br>RPJMD<br>(2023) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>RPJMD |
|----|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|------|------------------------------------|--|
|    |                                    |                    | 2019                  | 2021 | 2022 | 2023 |                                    |  |
| 1  | Cakupan pelayanan sosial bagi PMKS | 2,85               | 20%                   | 2%   | 2%   | 2%   | 80%<br>(SPM)                       | 80%                                    |

Pembangunan kesejahteraan social di kabupaten magetan telah menunjukkan kemajuan berarti dari tahun 2018. Namun demikian jika dibandingkan dengan populasi PMKS yang cukup besar dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia dan intervensi yang telah dilakukan, maka upaya pelayanan terhadap PMKS tersebut masih perlu ditingkatkan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan social, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dari uraian diatas kenaikan yang signifikan ditargetkan pada tahun 2019 sejumlah 20.406 orang sedangkan terealisasi sejumlah 4.081 orang sehingga prosentase naik dari tahun 2018 sejumlah 2% menjadi 20% sehingga ada kenaikan sejumlah 18%.

2. Presentase cakupan pelayanan kebutuhan pangan untuk masyarakat miskin

PERIODE TAHUN 2018-2023

| No | Indikator  | Baseline<br>(2018) | Capaian Kinerja Tahun |      |      |      | Target<br>Akhir<br>RPJMD<br>(2023) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>RPJMD |
|----|--|--------------------|-----------------------|------|------|------|------------------------------------|--|
|    |  |                    | 2019                  | 2021 | 2022 | 2023 |                                    |  |
| 1  | Cakupan pelayanan kebutuhan pangan untuk masyarakat miskin | 100%               | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 80%<br>(SPM)                       | 100%                                   |

Cakupan pelayanan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada tahun 2018 ditargetkan sejumlah 100% akan tetapi pada tahun 2019 bisa terealisasi sejumlah 93%, karena terdapat indikasi kepesertaan ganda sebanyak 2900 orang. Sehingga penyerapan anggaran tidak bisa mencapai 100%

3. Persentase Lembaga sosial dan keagamaan yang meningkat aktifitasnya

PERIODE TAHUN 2018-2023

| No | Indikator   | Baseline<br>(2018) | Capaian Kinerja Tahun |      |      |      | Target<br>Akhir<br>RPJMD<br>(2023) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>RPJMD |
|----|---|--------------------|-----------------------|------|------|------|------------------------------------|--|
|    |   |                    | 2019                  | 2021 | 2022 | 2023 |                                    |  |
| 1  | Persentase Lembaga sosial dan keagamaan yang meningkat aktifitasnya | 70%                | 78%                   | 100% | 100% | 100% | 100%                               | 100%                                   |

Persentase Lembaga sosial dan keagamaan yang meningkat aktifitasnya dari yang ditargetkan 100% bisa terealisasi hanya bisa 78% dikarenakan dari Lembaga sosial dan keagamaan yang mengajukan keseluruhan tidak terealisasi 11 lembaga sosial dikarenakan tidak memenuhi persyaratan atau kelengkapan pengajuan hibah.

4. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti

PERIODE TAHUN 2018-2023

| No | Indikator                         | Baseline<br>(2018) | Capaian Kinerja Tahun |      |      |      | Target<br>Akhir<br>RPJMD<br>(2023) | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>RPJMD |
|----|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------|------|------------------------------------|--|
|    |                                   |                    | 2019                  | 2021 | 2022 | 2023 |                                    |  |
| 1  | Persentase penyandang disabilitas | 5,62%              | 57%                   | 80%  | 80%  | 80%  | 100%                               | 57%                                    |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

Target RKPD pada tahun 2019 adalah sejumlah 996 orang, namun realisasi hanya 577 orang. Sehingga realisasi hanya 58%. Hal ini disebabkan anggaran masih cukup untuk penyandang disabilitas terlantar yang menerima program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dasar diluar panti selama tahun 2019 naik dari tahun sebelumnya sebesar 5,62% menjadi 58% sehingga ada kenaikan sejumlah 52,38%. Kenaikan capaian kinerja yang sangat signifikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan anggaran program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial APBD kabupaten Magetan tahun 2019 sebesar Rp. 733.500.000 dan peningkatan bantuan dari kementrian sosial RI baik bantuan yang langsung ditransfer melalui BRI ke penerima manfaat sejumlah 248 penerima manfaat maupun bantuan kemandirian penyandang disabilitas melalui Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wiyata Guna Bandung, Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. SEOHARSO Surakarta. Dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) Kartini Temanggung.

5. Persentase Anak Terlantar Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Di Luar Panti

PERIODE TAHUN 2018 - 2023

| No | Indikator   | Baseline (2018) | Capaian dan Target Kinerja Tahun |      |      |      | Target Akhir RPJMD (2023) | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD |
|----|---|-----------------|----------------------------------|------|------|------|---------------------------|-------------------------------|
|    |   |                 | 2019                             | 2021 | 2022 | 2023 |                           |                               |
| 1  | Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti | -               | 54%                              | 100% | 100% | 100% | 100%                      | 54%                           |

Berdasarkan tabel diatas bisa diuraikan Persentase anak terlantar yang Menerima Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dasar diluar panti selama tahun 2019tercapai 54 % ( 720 orang ) , sedangkan target seluruhnya pada tahun 2019 sejumlah 1.340 orang Dari Capaian ini didukung adanya ketersediaan anggaran dari APBD Kabupaten Magetan tahun 2019 dan upaya peningkatan kerjasama / jejaring dengan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur melalui panti sosial dibawah Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.

6. Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Di Luar Panti

PERIODE TAHUN 2018 – 2023

| No | Indikator  | Baseline (2018) | Capaian dan Target Kinerja Tahun |      |      |      | Target Akhir RPJMD (2023) | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD |
|----|--|-----------------|----------------------------------|------|------|------|---------------------------|-------------------------------|
|    |  |                 | 2019                             | 2021 | 2022 | 2023 |                           |                               |
| 1  | Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti | -               | 54%                              | 100% | 100% | 100% | 100%                      | 54%                           |

Persentase lanjut usia terlantar yang menerima Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dasar diluar panti selama tahun 2019 tercapai 28 % dari target sejumlah 1.745 orang masih terealisasi sejumlah 480 orang. Capaian target dimaksud disebabkan anggaran yang tersedia untuk penanganan lanjut usia terlantar masih bisa mencukupi Lanjut Usia Terlantar sejumlah 200 orang. untuk pelaksanaan program bunda kasih yakni Program Bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar sebatangkara selama 1 ( satu ) tahun yaitu dengan cara transfer ke rekening wali,sehingga mengurangi jumlah jangkauan pelayanan bagi penerima manfaat lanjut usia terlantar lainnya. Disamping itu bantuan dari Kementerian Sosial RI melalui Program BANTU LU mengalami penurunan jumlah sebesar 80 %.



7. Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Di Luar Panti

PERIODE TAHUN 2018 – 2023

| No | Indikator | Baseline (2018) | Capaian dan Target Kinerja Tahun |   |      |       | Target Akhir RPJMD (2023) | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD |
|----|-----------|-----------------|----------------------------------|---|------|-------|---------------------------|-------------------------------|
|    |           |                 | 2019                             | 2021  | 2022 | 2023  |                           |                               |
|    |           |                 | 1                                | Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti | -    | 100 % |                           |                               |

Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah indikator yang menunjukkan jumlah tuna sosial yang menerima program pelayanan dan rehabilitasi kesos dibandingkan dengan target jumlah tuna sosial pada tahun berjalan. Target pada tahun 2019 adalah 100 % hal ini didasarkan pada jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diselesaikan secara tuntas sesuai dengan kasus yang ada. Hal ini dikarenakan mobilitas penyandang masalah tuna sosial (gelandangan dan pengemis) sangat tinggi.

8. Prosentase Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Menggunakan Sarana

PERIODE TAHUN 2018 - 2023

| No | Indikator | Baseline (2018) | Capaian dan Target Kinerja Tahun |  |      |       | Target Akhir RPJMD (2023) | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD |
|----|-----------|-----------------|----------------------------------|--|------|-------|---------------------------|-------------------------------|
|    |           |                 | 2019                             | 2021   | 2022 | 2023  |                           |                               |
|    |           |                 | 1                                | Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah | -    | 100 % |                           |                               |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| tanggap darurat<br>bencana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Persentase korban bencana skala Kabupaten yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pada tahun 2019 bisa terealisasi sejumlah 100% dari yang ditargetkan pada tahun 2018 sejumlah 100%. Dikarenakan apabila terjadi bencana alam secara keseluruhan korban kita akomodir dalam hal mengerahkan semua potensi yang ada, Bantuan penyelamatan bagi korban, pendirian hunian sementara, melakukan antisipasi dampak bencana lanjutan dan penyelenggaraan dapur umum.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Magetan serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan.

Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebagaimana tabel berikut :

**TABEL. 2.2****Analisa Tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2018 s/d 2023**

Pada bab ini akan diuraikan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Pembangunan Daerah                                    | Target NSPK | Target IKK | Target indicator Lainnya | Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke- |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke- |        |        |       |        | Rasio capaian pada Tahun Ke- |       |       |       |       |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|--------|-------|--------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |   |             |            |                          | 1   | 2     | 3     | 4     | 5     | 1                           | 2      | 3      | 4     | 5      | 1                            | 2     | 3     | 4     | 5     |
| (1) | (2)   | (3)         | (4)        | (5)                      | (6)                                       | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)                        | (12)   | (13)   | (14)  | (15)   | (16)                         | (17)  | (18)  | (19)  | (20)  |
| 1   | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social  |             |            | 80%                      | 3,61%                                     | 3,92% | 4,20% | 4,45% | 4,65% | 54,11%                      | 11,83% | 17,64% | 18%   | 29,29% | 14,99%                       | 3,02% | 4,20  | 4,04% | 6,30% |
| 2   | Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan KUBE atau kelompok social ekonomi sejenisnya |             |            | 80%                      | 3,56%                                     | 3,87% | 3,99% | 4,32% | 4,57% | 0%                          | 0%     | 0,81%  | 0,60% | 0%     | 0%                           | 0%    | 0,05% | 0,14% | 0%    |
| 3   | Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan social ( SPM)                                |             |            | 80%                      | 100%                                      | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                        | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%                         | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| 4   | Persentase korban bencana yang dievakuasi (SPM)   |             |            | 80%                      | 100%                                      | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                        | 100%   | 0%     | 0%    | 0%     | 100%                         | 100%  | 0%    | 0%    | 0%    |

|   |   |  |  |      |        |        |        |     |     |        |        |        |     |     |       |      |       |       |      |
|---|---|--|--|------|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|-----|-------|------|-------|-------|------|
| 5 | Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan Sosial (SPM)         |  |  | 80%  | 14,09% | 54,11% | 54,46% | 60% | 68% | 14,09% | 54,11% | 54,46% | 60% | 68% | 100%  | 100% | 100%  | 100%  | 100% |
| 6 | Jumlah sarana peribadatan yang terfasilitasi                  |  |  | 100% | 600    | 200    | 200    | 200 | 200 | 641    | 512    | 216    | 57  | 66  | 85,3% | 256% | 108%% | 28,5% | 33%  |
| 7 | Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pemerintah daerah |  |  | 100% | 9      | 9      | 9      | 9   | 9   | 9      | 9      | 9      | 9   | 9   | 100%  | 100% | 100%  | 100%  | 100% |

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana SKD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang yang dapat tertampung dalam APBD selama ini dikarenakan keterbatasan dana dari pemerintah.

Untuk dapat mendukung kondisi sesuai yang diinginkan, kemampuan teknis bidang kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti yang selama ini terjadi.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan perencanaan program/kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Magetan sehingga aparatur semakin profesional di bidang tugasnya masing-masing. Untuk itu kualitas aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam menyusun dokumen perencanaan beberapa isu-isu strategis yang menjadi bahan pertimbangan adalah sebagai berikut:

a) Isu internal

1) Tugas Pokok dan Fungsi

- Inovasi-inovasi dibidang kesejahteraan sosial dengan melibatkan masyarakat/ fasilitas/ pengusaha/ pekerja untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi dan

tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan serta tuntutan masyarakat.

- Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Magetan dan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan dinamika perubahan.
- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi.
- Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses kesejahteraan sosial masyarakat dengan melibatkan masyarakat / fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi upaya pelayanan kesejahteraan sosial.
- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi.
- Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

## 2) Sumber Daya Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

## 3) Sarana dan Prasarana

- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahab dan optimalisasi pemeliharaan.

## 4) Keterbatasan Kemampuan Anggaran

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tidak saja dialami oleh Pemerintah Pusat namun juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu

membayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Magetan menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b) Isu Eksternal

1) Globalisasi

Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang. Kemajuan di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia virtual.

2) Peraturan Perundang-undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, transparan dan akuntabel. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat serta penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Beberapa Isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di bidang sosial sebagai berikut :

1. Masih rendahnya PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
2. Rendahnya Jumlah PMKS yang Tertangani
3. Rendahnya Jumlah PMKS yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya
4. Rendahnya Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia yang Mendapatkan Jaminan Sosial

5. Ketersediaan Basis Data Terpadu Data kemiskinan yang belum valid dan akuntabel

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal.

Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarnya.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut :



TABEL. 2.4  
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2021 Dengan Hasil Analisis Kebutuhan  
Dinas Sosial Kab.Magetan

Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Magetan

| No | Rancangan Awal RKPD                                      |                     |   |                  |                    | Hasil Analisis Kebutuhan                                 |                     |   |                  |                     | Catatan Penting |
|----|--|---------------------|---|------------------|--------------------|--|---------------------|---|------------------|---------------------|-----------------|
|    | Urusan/Program/Kegiatan                                  | Lokasi              | Indikator kinerja   | Target           | Pagu indikatif     | Urusan/Program/Kegiatan                                  | Lokasi              | Indikator Kinerja   | Target           | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        | <i>Kab. Magetan</i> | <b>indeks kepuasan masyarakat</b>                                 | <b>82 indeks</b> | <b>490,000,000</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>        | <i>Kab. Magetan</i> | <b>indeks kepuasan masyarakat</b>                                 | <b>82 indeks</b> | <b>490,000,000</b>  |                 |
|    | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia           | 12 Bulan         | 350,000,000        | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia           | 12 Bulan         | 350,000,000         |                 |
|    | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah         | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia       | 12 Bulan         | 120,000,000        | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah         | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia       | 12 Bulan         | 120,000,000         |                 |
|    | Survey Kepuasan masyarakat                               | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah ketersediaan dokumen IKM                                   | 1 Dokumen        | 20,000,000         | Survey Kepuasan masyarakat                               | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah ketersediaan dokumen IKM                                   | 1 Dokumen        | 20,000,000          |                 |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | <i>Kab. Magetan</i> | <b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b> | <b>100.00 %</b>  | <b>205,000,000</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | <i>Kab. Magetan</i> | <b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b> | <b>100.00 %</b>  | <b>205,000,000</b>  |                 |
|    | pengadaan Kendaraan dinas/operasional                    | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah kendaraan dinas yang bertambah                             | 3 Unit           | -                  | pengadaan Kendaraan dinas/operasional                    | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah kendaraan dinas yang bertambah                             | 3 Unit           | -                   |                 |
|    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                 | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah gedung kantor yang terpelihara                             | 1 Unit           | 50,000,000         | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                 | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah gedung kantor yang terpelihara                             | 1 unit           | 50,000,000          |                 |
|    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara             | 7 Unit           | 75,000,000         | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara             | 7 unit           | 75,000,000          |                 |
|    | Pengadaan Perlengkapan Kantor-                           | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah perlengkapan kantor yang bertambah                         | 10 Unit          | 60,000,000         | Pengadaan Perlengkapan Kantor-                           | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah perlengkapan kantor yang bertambah                         | 10 Unit          | 60,000,000          |                 |

|  |   |                            |   |                 |                    |   |                            |   |                 |                    |
|--|---|----------------------------|---|-----------------|--------------------|---|----------------------------|---|-----------------|--------------------|
|  | Pemeliharaan Perlengkapan Kantor  | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara  | 20 Unit         | 20,000,000         | Pemeliharaan Perlengkapan Kantor  | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara  | 20 Unit         | 20,000,000         |
|  | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor  | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah gedung kantor yang terpelihara / direhab   | 1 Unit          | 0                  | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor  | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah gedung kantor yang terpelihara / direhab   | 1 Unit          | 0                  |
|  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b><i>Kab. Magetan</i></b> | <b>Persentase aparatur yang memiliki kompetensi</b>   | <b>5.00 %</b>   | <b>10,000,000</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b><i>Kab. Magetan</i></b> | <b>Persentase aparatur yang memiliki kompetensi</b>   | <b>5.00 %</b>   | <b>10,000,000</b>  |
|  | Pendidikan dan pelatihan formal   | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal   | 10 Orang        | 10,000,000         | Pendidikan dan pelatihan formal   | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal   | 10 Orang        | 10,000,000         |
|  | <b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b> | <b><i>Kab. Magetan</i></b> | <b>Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku</b> | <b>100.00 %</b> | <b>30,000,000</b>  | <b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b> | <b><i>Kab. Magetan</i></b> | <b>Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku</b> | <b>100.00 %</b> | <b>30,000,000</b>  |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah     | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tersedia                                  | 5 Dokumen       | 30,000,000         | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah     | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tersedia                                  | 5 Dokumen       | 30,000,000         |
|  | <b>Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</b>                        | <b><i>Kab. Magetan</i></b> | <b>Prosentase keluarga miskin yang mendapat bantuan dan penanganan</b>                                | <b>2.00 %</b>   | <b>475,000,000</b> | <b>Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</b>                        | <b><i>Kab. Magetan</i></b> | <b>Prosentase keluarga miskin yang mendapat bantuan dan penanganan</b>                                | <b>2.00 %</b>   | <b>475,000,000</b> |
|  | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin                   | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pangan  | 1180 Paket      | -                  | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin                   | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pangan  | 1180 Paket      | -                  |
|  | Pendataan PMKS  | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah dokumen pemutahiran Basis Data Terpadu Fakir Miskin dan orang tidak mampu                      | 1 Dokumen       | 150,000,000        | Pendataan PMKS  | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah dokumen pemutahiran Basis Data Terpadu Fakir Miskin dan orang tidak mampu                      | 1 Dokumen       | 150,000,000        |

|  |  |                     |   |                                |                      |  |                     |   |                                |                      |
|--|--|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|
|  | Pemberdayaan Fakir Miskin                                      | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan UEP Kube  | 200 Orang                      | 125,000,000          | Pemberdayaan Fakir Miskin                                      | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan UEP Kube  | 200 Orang                      | 125,000,000          |
|  | Pendampingan Bantuan Sosial Pangan                             | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah KPM / Desa / Kelurahan yang mendapatkan bantuan sosial pangan / BPNT   | 235 Desa/Kelurahan             | 200,000,000          | Pendampingan Bantuan Sosial Pangan                             | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah KPM / Desa / Kelurahan yang mendapatkan bantuan sosial pangan / BPNT   | 235 Desa/Kelurahan             | 200,000,000          |
|  | <b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b> | <i>Kab. Magetan</i> | <b>Persentase penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar, Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar, Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar, Persentase anak terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar</b> | <b>82.00 %<br/>0 %<br/>0 %</b> | <b>1,355,000,000</b> | <b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b> | <i>Kab. Magetan</i> | <b>Persentase penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar, Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar, Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar, Persentase anak terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar</b> | <b>82.00 %<br/>0 %<br/>0 %</b> | <b>1,355,000,000</b> |

|  |  |                     |  |           |               |  |                     |  |           |               |
|--|--|---------------------|--|-----------|---------------|--|---------------------|--|-----------|---------------|
|  | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak                       | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan social                                       | 60 orang  | 50,000,000.00 | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak                       | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan social                                       | 60 orang  | 50,000,000.00 |
|  | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang terfasilitasi              | 150 orang | 200,000,000   | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang terfasilitasi              | 150 orang | 200,000,000   |
|  | Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Rumah Singgah   | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah PMKS khususnya gelandangan dan pengemis yang terfasilitasi                                      | 60 orang  | 80,000,000    | Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Rumah Singgah   | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah PMKS khususnya gelandangan dan pengemis yang terfasilitasi                                      | 60 orang  | 80,000,000    |
|  | Penanganan Lanjut Usia Terlantar   | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial baik di dalam panti maupun diluar panti | 200 orang | 600,000,000   | Penanganan Lanjut Usia Terlantar   | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial baik di dalam panti maupun diluar panti | 200 orang | 600,000,000   |
|  | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial   | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan ketrampilan             | 100 orang | 75,000,000    | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial   | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan ketrampilan             | 100 orang | 75,000,000    |
|  | Pelayanan kesehatan sosial bagi PMKS   | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan kesehatan social  | 180 orang | 150,000,000   | Pelayanan kesehatan sosial bagi PMKS   | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan kesehatan sosial  | 180 orang | 150,000,000   |
|  | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma  | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan dan pelayanan social                             | 22 orang  | 200,000,000   | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma  | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan dan pelayanan sosial                             | 200 orang | 200,000,000   |

| <b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>                       | <b>Kab. Magetan</b> | <b>Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan</b>  | <b>10.00 %</b>  | <b>400,000,000</b> | <b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>                       | <b>Kab. Magetan</b> | <b>Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan</b>  | <b>10.00 %</b>  | <b>400,000,000</b> |
|--|---------------------|---|-----------------|--------------------|--|---------------------|---|-----------------|--------------------|
| Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah kegiatan pameran yang diikuti  | 1 Kali          | 50,000,000         | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah kegiatan pameran yang diikuti  | 1 Kali          | 50,000,000         |
| Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat                           | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan  | 71 Orang        | 100,000,000        | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat                           | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan  | 71 Orang        | 100,000,000        |
| Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial                                 | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah lembaga sosial yang mendapatkan bantuan dan pembinaan  | 92 Lembaga      | 100,000,000        | Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial                                 | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah lembaga sosial yang mendapatkan bantuan dan pembinaan  | 92 Lembaga      | 100,000,000        |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan  | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah TMP Yudonegoro yang terpelihara  | 12 Bulan        | 100,000,000        | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan  | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah TMP Yudonegoro yang terpelihara  | 12 Bulan        | 100,000,000        |
| Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial         | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah makam leluhur yang dilestarikan  | 7 makam         | 50,000,000         | Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial         | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah makam leluhur yang dilestarikan  | 7 makam         | 50,000,000         |
| SLRT (Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu)  | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah keluhan PMKS, rujukan dan kebutuhan masy terkait program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan |                 | -                  | SLRT (Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu)  | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah keluhan PMKS, rujukan dan kebutuhan masy terkait program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan |                 | -                  |
| <b>Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</b>                          | <b>Kab. Magetan</b> | <b>Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan social</b>  | <b>100.00 %</b> | <b>150,000,000</b> | <b>Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</b>                          | <b>Kab. Magetan</b> | <b>Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan social</b>  | <b>100.00 %</b> | <b>150,000,000</b> |

|  |   |                            |  |                 |                      |   |                            |  |                 |                      |
|--|---|----------------------------|--|-----------------|----------------------|---|----------------------------|--|-----------------|----------------------|
|  | Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat                          | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat         | 1 Kali          | 150,000,000          | Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat                          | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat         | 1 Kali          | 150,000,000          |
|  | Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana                              | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan dan perlindungan jaminan sosial                  | 100 KK          | 0                    | Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana                              | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan dan perlindungan jaminan sosial                  | 100 KK          | 0                    |
|  | <b>Program Bantuan dan Perlindungan Sosial</b>                                    | <b><i>Kab. Magetan</i></b> | <b>Persentase rumahtangga/individu sasaran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial</b> | <b>100.00 %</b> | <b>1,225,000,000</b> | <b>Program Bantuan dan Perlindungan Sosial</b>                                    | <b><i>Kab. Magetan</i></b> | <b>Persentase rumahtangga/individu sasaran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial</b> | <b>100.00 %</b> | <b>1,225,000,000</b> |
|  | Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)                           | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah pendamping PKH yang terfasilitasi dan Rakor PKH yang terselenggara                    | 212 orang       | 500,000,000          | Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)                           | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah pendamping PKH yang terfasilitasi dan Rakor PKH yang terselenggara                    | 212 orang       | 500,000,000          |
|  | Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar                           | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang terfasilitasi                                | 50 orang        | 75,000,000           | Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar                           | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang terfasilitasi                                | 50 orang        | 75,000,000           |
|  | Pengadaan bahan makanan untuk PMKS  | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bahan makanan   | 2500 paket      | 400,000,000          | Pengadaan bahan makanan untuk PMKS  | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bahan makanan   | 2500 paket      | 500,000,000          |
|  | Pengadaan cadangan gudang untuk pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah cadangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang tersedia            | 500 Paket       | 150,000,000          | Pengadaan cadangan gudang untuk pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah cadangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang tersedia            | 500 Paket       | 150,000,000          |
|  | Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin                               | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah KPM PKH yang mendapatkan pelatihan ketrampilan  | 100 Orang       | 100,000,000          | Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin                               | <i>Kab. Magetan</i>        | Jumlah KPM PKH yang mendapatkan pelatihan ketrampilan  | 100 Orang       | 100,000,000          |

|  | <b>Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial</b>                                | <i>Kab. Magetan</i> | <b>persentase lembaga keagamaan, lembaga sosial yang difasilitasi bantuan/pembinaan</b> | <b>84.00 %</b> | <b>150,000,000</b>   | <b>Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial</b>                                | <i>Kab. Magetan</i> | <b>persentase lembaga keagamaan, lembaga sosial yang difasilitasi bantuan/pembinaan</b> | <b>84.00 %</b> | <b>150,000,000</b>   |
|--|--|---------------------|---|----------------|----------------------|--|---------------------|---|----------------|----------------------|
|  | Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan yang terfasilitasi      | 122 Lembaga    | 150,000,000          | Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan | <i>Kab. Magetan</i> | Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan yang terfasilitasi      | 122 Lembaga    | 150,000,000          |
|  |  |                     |   |                | <b>4.490,000,000</b> |  |                     |   |                | <b>4.490,000,000</b> |

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam tahun 2021 ini terdapat program/kegiatan yang diusulkan kelompok masyarakat melalui Kecamatan yang langsung ditujukan ke Dinas Kabupaten Magetan melalui Musrenbang, sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2021 merupakan perpaduan dari program/kegiatan yang sudah direncanakan dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya dan hasil Musrenbang Kecamatan.

Tabel. 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2021

| No | Program / Kegiatan  | Lokasi         | Indikator   | Jumlah Lembaga (Rp)  | Ket   |
|----|---|----------------|---|--|---|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Program Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial</li> <li>❖ Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan</li> </ul> | Se Kab Magetan | Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan yang terbantu | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 100 lembaga</li> <li>❖ Rp. 2,522,000,000</li> </ul> | Hibah untuk tempat peribadatan dan lembaga keagamaan / Sosial |



## BAB III

### TUJUAN, dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 agenda pembangunan nasional antara lain adalah Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain dilaksanakan melalui Penerapan *e-government* untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan dan terintegrasi.

Agenda pembangunan nasional selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, dengan sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah, antara lain dilaksanakan dengan membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik.

Agenda pembangunan nasional lainnya adalah peningkatan investasi dengan sasaran meningkatnya investasi PMA dan PMDN melalui menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik ditingkat pusat maupun daerah, dilaksanakan antara lain dengan Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk

memonitor, mengatasi permasalahan investasi dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.

Agenda lain adalah peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi, dengan sasaran :

1. meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mendukung daya saing sektor produksi barang dan jasa;
2. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam;
3. serta penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global;
4. terbangunnya 100 *Techno Park* dikabupaten/kota dan *Science Park* di setiap provinsi.

Untuk mensukseskan agenda prioritas pembangunan nasional yang telah digariskan, diperlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan bertekad untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi publik yang sebanyak-banyaknya melalui penyelenggaraan musrenbang serta penerapan e-goverment yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara online.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang substansinya merupakan penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Magetan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Penyusunan dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2021 harus sesuai dengan Visi Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah "***Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas***".

Dalam merealisasikan visi tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Magetan memiliki misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui upaya-upaya pemberian bantuan dan pemberdayaan PMKS dan PSKS
- 2) Meningkatkan bantuan dan pemberdayaan sosial fakir miskin dengan menumbuhkembangkan kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan yang mandiri dan berkualitas.
- 3) Terwujudnya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, keterlantaran dan tuna sosial sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar.

Dari Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Magetan diatas selanjutnya dijabarkan kedalam Program yang yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
5. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9. Program Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
10. Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dan penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

#### **❖ Tujuan**

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis

#### **❖ Sasaran**

- Meningkatnya cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS

- Meningkatnya kualitas lembaga sosial dan keagamaan

❖ **Indikator Tujuan / Sasaran**

- Cakupan pelayanan sosial bagi PMKS
- Cakupan pelayanan kebutuhan pangan untuk masyarakat miskin
- Cakupan pelayanan sosial bagi korban bencana
- Persentase lembaga sosial dan keagamaan yang meningkat aktifitasnya
- Persentase penyelesaian tugas pokok dan fungsi
- Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan yang terfasilitasi

Target sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2021:

**Tabel 3.2**  
**Target Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2021**

| NO. | TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  | Target Kinerja Tahun 2020 |
|-----|---|--|--|---------------------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)  | (5)                       |
| 1.  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti                  | Penyandang disabilitas terlantar di luar panti               | Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar                          | 80%                       |
| 2.  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                                    | Anak terlantar di luar panti                                 | Jumlah penyandang anak terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar                                 | 80%                       |
| 3.  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti                             | Lanjut usia terlantar di luar panti                          | Jumlah penyandang lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar                          | 40%                       |
| 4.  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti    | Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah penyandang tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar | 80%                       |
| 5.  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban | Korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat         | Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat              | 100%                      |

| NO. | TUJUAN                 | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Tahun 2020 |
|-----|------------------------|---------|-------------------|---------------------------|
| (1) | (2)                    | (3)     | (4)               | (5)                       |
|     | bencana kabupaten/kota |         |                   |                           |

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
  - Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah
  - Survey kepuasan masyarakat
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Pengadaan perlengkapan kantor
  - Pemeliharaan perlengkapan kantor
  - Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
  - Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
  - Pendataan PMKS
  - Pemberdayaan Fakir Miskin
  - Pendamping Bantuan Sosial Pangan
  - Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial (DAK)
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak
  - Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.
  - Pelayanan psikososial bagi PMKS di rumah singgah
  - Penanganan lanjut usia terlantar

- Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit social
  - Pelayanan kesehatan bagi PMKS
  - Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
    - Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesos masyarakat
    - Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan masyarakat
    - Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
    - Pemeliharaan taman makam pahlawan
    - Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
  8. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
    - Kesiapsiagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat
    - Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana
  9. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
    - Pendampingan operasional Program Keluarga Harapan (PKH)
    - Penanganan dan perlindungan social bagi orang terlantar
    - Pengadaan bahan makananan untuk PMKS
    - Pengadaan cadangan Gudang untuk pemenuhan social bagi korban bencana
    - Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
  10. Program Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial
    - Peningkatan kualitas pelayanan hibah kepada Lembaga Keagamaan dan tempat ibadah.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Magetan akan melaksanakan Program dan Kegiatan tahun rencana, Target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya sebagai berikut :

TABEL. 4  
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

| NO | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH DAN PROGRAM /<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM / KEGIATAN   | RENCANA TAHUN 2021 |                              |   |
|----|---|---|--------------------|------------------------------|---|
|    |   |   | LOKASI             | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | KEBUTUHAN<br>DANA /<br>PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
| 1  | 2   | 3   | 4                  | 5                            | 6   |
|    | <b>Program Pelayanan<br/>Administrasi Perkantoran</b>   | <b>indeks kepuasan<br/>masyarakat</b>   |                    | <b>81 indeks</b>             | <b>490,000,000</b>                            |
|    | Penyediaan Jasa dan<br>Pelayanan Administrasi<br>Perkantoran                                      | Jumlah pelayanan<br>administrasi perkantoran<br>yang tersedia   | Kabupaten          | 12 Bulan                     | 350,000,000                                   |
|    | Pelayanan Perjalanan Dinas<br>Dalam dan Luar Daerah   | Jumlah perjalanan dinas<br>dalam dan luar daerah<br>yang tersedia   | Kabupaten          | 12 Bulan                     | 120,000,000                                   |
|    | Survey Kepuasan masyarakat  | Jumlah ketersediaan<br>dokumen IKM  | Kabupaten          | 1 Dokumen                    | 20,000,000                                    |
|    | <b>Program Peningkatan<br/>Sarana dan Prasarana<br/>Aparatur</b>                                  | <b>Persentase sarana dan<br/>prasarana aparatur<br/>yang layak fungsi</b>   |                    | <b>100.00 %</b>              | <b>205,000,000</b>                            |
|    | pengadaan Kendaraan<br>dinas/operasional  | Jumlah kendaraan dinas<br>yang bertambah  | Kabupaten          | 3 Unit                       | -   |
|    | Pemeliharaan rutin/berkala<br>gedung kantor   | Jumlah gedung kantor<br>yang terpelihara  | Kabupaten          | 1 Unit                       | 50,000,000                                    |
|    | Pemeliharaan rutin/berkala<br>kendaraan dinas/operasional   | Jumlah kendaraan dinas /<br>operasional yang<br>terpelihara   | Kabupaten          | 7 Unit                       | 75,000,000                                    |
|    | Pengadaan Perlengkapan<br>Kantor-   | Jumlah perlengkapan<br>kantor yang bertambah  | Kabupaten          | 10 Unit                      | 60,000,000                                    |
|    | Pemeliharaan Perlengkapan<br>Kantor   | Jumlah perlengkapan<br>kantor yang dipelihara   | Kabupaten          | 20 Unit                      | 20,000,000                                    |
|    | Rehabilitasi/ Pemeliharaan<br>Gedung Kantor   | Jumlah gedung kantor<br>yang terpelihara / direhab  | Kabupaten          | 1 Unit                       | 0   |
|    | <b>Program Peningkatan<br/>Kapasitas Sumber Daya<br/>Aparatur</b>                                 | <b>Persentase aparatur<br/>yang memiliki<br/>kompetensi</b>   |                    | <b>5.00 %</b>                | <b>10,000,000</b>                             |
|    | Pendidikan dan pelatihan<br>formal  | Jumlah ASN yang<br>mengikuti pendidikan dan<br>pelatihan formal   | Kabupaten          | 10 Orang                     | 10,000,000                                    |
|    | <b>Program Peningkatan<br/>Perencanaan, Laporan<br/>Kinerja dan Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase dokumen<br/>perencanaan kinerja<br/>dan keuangan yang<br/>disusun sesuai<br/>ketentuan yang<br/>berlaku</b> |                    | <b>100.00 %</b>              | <b>30,000,000</b>                             |
|    | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran<br>dan Capaian Kinerja<br>Perangkat daerah        | Jumlah dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran dan<br>pelaporan yang tersedia   | Kabupaten          | 5 Dokumen                    | 30,000,000                                    |

|  |  |   |           |                               |                      |
|--|--|---|-----------|-------------------------------|----------------------|
|  | <b>Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</b>   | <b>Prosentase keluarga miskin yang mendapat bantuan dan penanganan</b>  |           | <b>2.00 %</b>                 | <b>475,000,000</b>   |
|  | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin  | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pangan  | Kabupaten | 1180 Paket                    | -                    |
|  | Pendataan PMKS   | Jumlah dokumen pemutahiran Basis Data Terpadu Fakir Miskin dan orang tidak mampu  | Kabupaten | 1 Dokumen                     | 150,000,000          |
|  | Pemberdayaan Fakir Miskin  | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan UEP Kube  | Kabupaten | 200 Orang                     | 125,000,000          |
|  | Pendampingan Bantuan Sosial Pangan   | Jumlah KPM / Desa / Kelurahan yang mendapatkan bantuan sosial pangan / BPNT   | Kabupaten | 235 Desa/Kelurahan            | 200,000,000          |
|  | <b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>   | <b>Persentase penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar, Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar, Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar, Persentase anak terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar</b> |           | <b>82.00 %, 0 %, 0 %, 0 %</b> | <b>1,355,000,000</b> |
|  | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak                       | Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan social  | Kabupaten | 60 orang                      | 50,000,000.00        |
|  | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal | Jumlah anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang terfasilitasi   | Kabupaten | 150 orang                     | 200,000,000          |
|  | Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Rumah Singgah   | Jumlah PMKS khususnya gelandangan dan pengemis yang terfasilitasi   | Kabupaten | 60 orang                      | 80,000,000           |
|  | Penanganan Lanjut Usia Terlantar   | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan social baik di dalam panti maupun diluar panti  | Kabupaten | 200 orang                     | 600,000,000          |
|  | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial   | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan ketrampilan  | Kabupaten | 100 orang                     | 75,000,000           |
|  | Pelayanan kesehatan sosial bagi PMKS   | Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan kesehatan sosial   | Kabupaten | 180 orang                     | 150,000,000          |
|  | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma  | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan dan pelayanan sosial  | Kabupaten | 22 orang                      | 200,000,000          |
|  | <b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>   | <b>Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan</b>  |           | <b>10.00 %</b>                | <b>400,000,000</b>   |
|  | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat                                     | Jumlah kegiatan pameran yang diikuti  | Kabupaten | 1 Kali                        | 50,000,000           |



|  |  |   |           |                 |                      |
|--|--|---|-----------|-----------------|----------------------|
|  | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat                             | Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan  | Kabupaten | 71 Orang        | 100,000,000          |
|  | Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial                                   | Jumlah lembaga sosial yang mendapatkan bantuan dan pembinaan  | Kabupaten | 92 Lembaga      | 100,000,000          |
|  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan  | Jumlah TMP Yudonegoro yang terpelihara  | Kabupaten | 12 Bulan        | 100,000,000          |
|  | Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial           | Jumlah makam leluhur yang dilestarikan  | Kabupaten | 7 makam         | 50,000,000           |
|  | SLRT (Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu)  | Jumlah keluhan PMKS, rujukan dan kebutuhan masy terkait program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan | Kabupaten |                 | -                    |
|  | <b>Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</b>                            | <b>Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial</b>  |           | <b>100.00 %</b> | <b>150,000,000</b>   |
|  | Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat                             | Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat                                      | Kabupaten | 1 Kali          | 150,000,000          |
|  | Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana                                 | Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan dan perlindungan jaminan sosial   | Kabupaten | 100 KK          | 0                    |
|  | <b>Program Bantuan dan Perlindungan Sosial</b>                                       | <b>Persentase rumah tangga/individu sasaran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial</b>                             |           | <b>100.00 %</b> | <b>1,225,000,000</b> |
|  | Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)                              | Jumlah pendamping PKH yang terfasilitasi dan Rakor PKH yang terselenggara   | Kabupaten | 212 orang       | 500,000,000          |
|  | Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar                              | Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang terfasilitasi   | Kabupaten | 50 orang        | 75,000,000           |
|  | Pengadaan bahan makanan untuk PMKS   | Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bahan makanan  | Kabupaten | 2500 paket      | 400,000,000          |
|  | Pengadaan cadangan gudang untuk pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana    | Jumlah cadangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang tersedia   | Kabupaten | 500 Paket       | 150,000,000          |
|  | Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin                                  | Jumlah KPM PKH yang mendapatkan pelatihan ketrampilan   | Kabupaten | 100 Orang       | 100,000,000          |
|  | <b>Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial</b>                                | <b>persentase lembaga keagamaan, lembaga sosial yang difasilitasi bantuan/pembinaan</b>                                   | Kabupaten | <b>84.00 %</b>  | <b>150,000,000</b>   |
|  | Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan | Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan yang terfasilitasi  |           | 122 Lembaga     | 150,000,000          |
|  | <b>JUMLAH</b>  |   |           |                 | <b>4,490,000,000</b> |

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1. Catatan Penting**

- a. Untuk keberhasilan pencapaian target Renja, seluruh unit yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Magetan wajib segera menindaklanjuti dengan penyusunan time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu;
- b. Untuk menjamin sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program-program pembangunan daerah, agar koordinasi intern dan lintas SKPD dilakukan secara intensif, sehingga diperoleh hasil maksimal dari pelaksanaan program/kegiatan.
- c. Dalam melaksanakan program/kegiatan agar memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi;
- d. Apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran, agar segera dilakukan penyesuaian terhadap target-target kinerja.

### **5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

- a. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2021 ini merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Magetan agar dalam menyusun rencana program/kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2021 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021;
- c. Untuk memastikan target-target di Renja tercapai, agar dilakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat segera diketahui pelaksanaan program/kegiatan yang menemui kendala/masalah agar segera dapat diambil langkah-langkah antisipasi.

### 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Sosial Kabupaten Magetan digunakan sebagai dasar dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja masing-masing unit kerja/aparaturnya Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Oleh karena itu segera setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan agar ditindaklanjuti dengan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai mengacu kepada indikator kinerja serta target yang tercantum dalam Renja serta ditindaklanjuti juga dengan perjanjian kinerja secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan sampai dengan pejabat eselon IV.

Magetan, Agustus 2020  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Magetan

**YAYUK SRI RAHAYU**  
Pembina  
NIP. 19680508 199302 2 003

**PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021  
BERDASARKAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

| KODE                | STRUKTUR ORGANISASI | RENSTRA/RENJA PD |               |                  |  |   |        |              | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019  |   |                    |   |  |                            |        |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |    |    |
|---------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|--|---|--------|--------------|--|---|--------------------|---|--|----------------------------|--------|------|---|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|----|----|
|                     |                     | KODE             | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR  | TARGET  | SATUAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | KEGIATAN  | INDIKATOR KEGIATAN | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM                            | BIDANG URUSAN              | URUSAN | KODE |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |    |    |
| <b>DINAS SOSIAL</b> |                     |                  |               |                  |  |   |        |              |  |   |                    |   |  |                            |        |      |   |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |    |    |
|                     |                     |                  |               | SOSIAL           | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran             | indeks kepuasan masyarakat                              | 82     | indeks       |  |   |                    |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | indeks kepuasan masyarakat | 06     | 1    | 1 | 06 |    |    |   |  |  |  |  |  |  |    |    |
|                     |                     |                  |               | SOSIAL           | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia | 100    | %            | Penyediaan Jasa Surat menyurat   | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia | Administrasi Umum  | - Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia<br>- Jumlah pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia<br>- Jumlah gedung kantor yang direhab<br>- Jumlah pengadaan kendaraan dinas<br>- Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara<br>- Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara<br>- Jumlah pengadaan perlengkapan kantor |  |                            |        | 06   | 1 | 1  | 06 | 01 | 2 |  |  |  |  |  |  |    |    |
|                     |                     |                  |               |                  |  |   |        |              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia |                    |   |  |                            | 06     | 1    | 1 | 06 | 01 | 2  |   |  |  |  |  |  |  | 02 |    |
|                     |                     |                  |               |                  |  |   |        |              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia |                    |   |  |                            | 06     | 1    | 1 | 06 | 01 | 2  |   |  |  |  |  |  |  | 06 |    |
|                     |                     |                  |               |                  |  |   |        |              | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia |                    |   |  |                            | 06     | 1    | 1 | 06 | 01 | 2  |   |  |  |  |  |  |  |    | 07 |
|                     |                     |                  |               |                  |  |   |        |              | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia |                    |   |  |                            | 06     | 1    | 1 | 06 | 01 | 2  |   |  |  |  |  |  |  |    | 08 |
|                     |                     |                  |               |                  |  |   |        |              | Penyediaan Jasa pengemudi  | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia |                    |   |  |                            | 06     | 1    | 1 | 06 | 01 | 2  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |
|                     |                     |                  |               |                  |  |   |        |              | Penyediaan Jasa keamanan   | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia |                    |   |  |                            | 06     | 1    | 1 | 06 | 01 | 2  |   |  |  |  |  |  |  |    |    |
|                     |                     |                  |               |                  |  |   |        |              | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia |                    |   |  |                            | 06     | 1    | 1 | 06 | 01 | 2  |   |  |  |  |  |  |  |    | 10 |
|                     |                     |                  |               |                  |  |   |        |              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia |                    |   |  |                            | 06     | 1    | 1 | 06 | 01 | 2  |   |  |  |  |  |  |  |    | 11 |

| KODE | STRUKTUR ORGANISASI | RENSTRA/RENJA PD |  |               |   |  |        | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 |  |   |   |   |  |  |               |        |      |    |   |    |  |
|------|---------------------|------------------|--|---------------|---|--|--------|---------------------------|--|---|---|---|--|--|---------------|--------|------|----|---|----|--|
|      |                     | KODE             |  | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN                                  | INDIKATOR  | TARGET | SATUAN                    | SUB KEGIATAN   | INDIKATOR SUB KEGIATAN  | KEGIATAN  | INDIKATOR KEGIATAN  | PROGRAM                                      | INDIKATOR PROGRAM  | BIDANG URUSAN | URUSAN | KODE |    |   |    |  |
|      |                     |                  |  |               |   |  |        |                           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia               |   |   |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2 | 12 |  |
|      |                     |                  |  |               |   |  |        |                           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia               |   |   |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2 | 13 |  |
|      |                     |                  |  |               |   |  |        |                           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia               |   |   |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2 | 14 |  |
|      |                     |                  |  |               |   |  |        |                           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia               |   |   |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2 | 15 |  |
|      |                     |                  |  |               |   |  |        |                           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia               |   |   |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2 | 16 |  |
|      |                     |                  |  |               |   |  |        |                           | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia               |   |   |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2 | 17 |  |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah  | Jumlah pelayanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia | 100    | %                         | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah             | Jumlah pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia | Administrasi Umum                                 | - Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia<br>- Jumlah pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia<br>- Jumlah gedung kantor yang direhab<br>- Jumlah pengadaan kendaraan dinas<br>- Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara<br>- Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara<br>- Jumlah pengadaan perlengkapan kantor |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2 | 18 |  |
|      |                     |                  |  |               |   |  |        |                           | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah            | Jumlah pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia |   |   |  | 06   | 1             | 1      | 06   |    |   |    |  |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Survey Kepuasan masyarakat                        | Jumlah ketersediaan dokumen IKM                            | 1      | Dokumen                   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah ketersediaan dokumen IKM                                       | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah ketersediaan dokumen IKM   |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2 | 05 |  |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 100    | %                         |  |   |   |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | - indeks kepuasan masyarakat<br>- Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 06            | 1      | 1    | 06 |   |    |  |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor          | Jumlah gedung kantor yang direhab                          | 1      | Unit                      | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         | Jumlah gedung kantor yang direhab                                     | Administrasi Umum                                 | - Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia - Jumlah pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia-<br>Jumlah gedung kantor yang direhab-<br>Jumlah pengadaan kendaraan dinas-<br>Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara-<br>Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara-<br>Jumlah pengadaan perlengkapan kantor         |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2 | 28 |  |

| KODE | STRUKTUR ORGANISASI | RENSTRA/RENJA PD |               |   |  |        |         | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019                              |  |   |   |  |  |               |        |      |    |    |    |    |
|------|---------------------|------------------|---------------|---|--|--------|---------|--|--|---|---|--|--|---------------|--------|------|----|----|----|----|
|      |                     | KODE             | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN  | INDIKATOR  | TARGET | SATUAN  | SUB KEGIATAN   | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | KEGIATAN  | INDIKATOR KEGIATAN  | PROGRAM                                      | INDIKATOR PROGRAM  | BIDANG URUSAN | URUSAN | KODE |    |    |    |    |
|      |                     |                  | SOSIAL        | pengadaan kendaraan dinas/operasional   | Jumlah pengadaan kendaraan dinas   | 2      | Unit    | pengadaan kendaraan dinas/operasional                  | Jumlah pengadaan kendaraan dinas                                     |   |   |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2  | 20 |    |
|      |                     |                  | SOSIAL        | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                            | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara   | 22     | Unit    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara                               |   |   |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2  | 30 |    |
|      |                     |                  | SOSIAL        | Pemeliharaan Perlengkapan Kantor  | Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara   | 20     | Unit    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  | Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara                           |   |   |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2  | 32 |    |
|      |                     |                  | SOSIAL        | Pengadaan Perlengkapan Kantor-  | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor   | 3      | Unit    | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                   | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor                                 |   |   |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2  | 22 |    |
|      |                     |                  | SOSIAL        | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor  | Jumlah gedung kantor yang direhab  | 1      | Unit    | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor               | Jumlah gedung kantor yang direhab                                    |   |   |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2  | 28 |    |
|      |                     |                  | SOSIAL        | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                | Persentase aparatur yang memiliki kompetensi   | 5      | %       |  |  |   |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | - indeks kepuasan masyarakat<br>- Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi<br>- Persentase aparatur yang memiliki kompetensi   | 06            | 1      | 1    | 06 | 01 | 2  |    |
|      |                     |                  | SOSIAL        | Pendidikan dan pelatihan formal   | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal    Orang                             | 5      |         | Pendidikan dan Pelatihan Formal                        | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                   | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan  |  |  | 06            | 1      | 1    | 06 | 01 | 2  | 09 |
|      |                     |                  | SOSIAL        | Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah    | Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku | 100    | %       |  |  |   |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | - indeks kepuasan masyarakat<br>- Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi<br>- Persentase aparatur yang memiliki kompetensi<br>- Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku | 06            | 1      | 1    | 06 | 01 | 2  |    |
|      |                     |                  | SOSIAL        | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tersedia                           | 7      | Dokumen | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah          | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tersedia | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | - Jumlah ketersediaan dokumen IKM<br>- Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tersedia |  |  | 06            | 1      | 1    | 06 | 01 | 2  | 01 |
|      |                     |                  |               |   |  |        |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tersedia |   |   |  | 06   | 1             | 1      | 06   | 01 | 2  | 05 |    |

| KODE | STRUKTUR ORGANISASI | RENSTRA/RENJA PD |               |                  |           |        |        |   | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019  |          |                    |  |  |  |   |   |    |    |     |    |    |    |   |
|------|---------------------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------|--------|---|--|----------|--------------------|--|--|--|---|---|----|----|-----|----|----|----|---|
|      |                     | KODE             | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | SATUAN | SUB KEGIATAN  | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM  | BIDANG URUSAN  | URUSAN  | KODE  |    |    |     |    |    |    |   |
|      |                     |                  |               |                  |           |        |        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tersedia             |          |                    |  |  |  |   | 6   | 01 | 01 | 2.0 | 01 |    |    |   |
|      |                     |                  |               |                  |           |        |        | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan                         | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tersedia             |          |                    |  |  | XX   | X   | X   | XX | 01 | 2.0 | 02 |    |    |   |
|      |                     |                  |               |                  |           |        | SOSIAL | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin             | Prosentase keluarga miskin yang mendapat bantuan dan penanganan                  | 2,00     | %                  |  |  |  | Program Pemberdayaan Sosial   | Prosentase keluarga miskin yang mendapat bantuan dan penanganan | 06 | 1  | 1   | 06 | 02 | 2  |   |
|      |                     |                  |               |                  |           |        | SOSIAL | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pangan                           | 100      | Orang              | Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan Kabupaten/Kota                             | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pangan                           | Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten/Kota | - Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pangan<br>- Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pembinaan<br>- Jumlah kegiatan pameran yang diikuti<br>- Jumlah Lembaga Sosial yang mendapatkan Bantuan dan Pembinaan |   |    |    |     | 1  | 06 | 02 | 2 |
|      |                     |                  |               |                  |           |        | SOSIAL | Pemberdayaan Fakir Miskin   | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan UEP KUBE                         | 200      | Paket              | Pemberdayaan Fakir Miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan UEP KUBE                         | Pemberdayaan Fakir Miskin  | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan UEP KUBE  |   |    | 06 | 1   | 1  | 06 | 02 | - |
|      |                     |                  |               |                  |           |        | SOSIAL | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin             | Prosentase keluarga miskin yang mendapat bantuan dan penanganan                  | 2        | %                  |  |  |  | Program perlindungan dan jaminan sosial   | Prosentase keluarga miskin yang mendapat bantuan dan penanganan | 06 | 1  | 1   | 06 | 05 |    |   |
|      |                     |                  |               |                  |           |        | SOSIAL | Pendataan PMKS  | Jumlah dokumen pemutahiran Basis Data Terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu | 1        | Dokumen            | Pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen pemutahiran Basis Data Terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah dokumen pemutahiran Basis Data Terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu    Dokumen   |   |    | 06 | 1   | 1  | 06 | 05 | 2 |
|      |                     |                  |               |                  |           |        | SOSIAL | Pendampingan Bantuan Sosial Pangan                                  | Jumlah KPM / Desa / Kelurahan yang mendapatkan bantuan sosial pangan / BPNT      | 235      | Desa / Kelurahan   | Pendampingan dan operasional dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial pangan  | Jumlah KPM / Desa / Kelurahan yang mendapatkan bantuan sosial pangan / BPNT      | Pendampingan Bantuan Sosial Pangan                                     | Jumlah KPM / Desa / Kelurahan yang mendapatkan bantuan sosial pangan / BPNT    %  |   |    | 06 | 1   | 1  | 06 | 05 | - |

| KODE | STRUKTUR ORGANISASI | RENSTRA/RENJA PD |  |               |  |  |                       | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 |   |  |   |   |  |                   |               |        |      |    |    |   |
|------|---------------------|------------------|--|---------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|--|---|---|--|-------------------|---------------|--------|------|----|----|---|
|      |                     | KODE             |  | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN   | INDIKATOR  | TARGET                | SATUAN                    | SUB KEGIATAN  | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | KEGIATAN  | INDIKATOR KEGIATAN  | PROGRAM  | INDIKATOR PROGRAM | BIDANG URUSAN | URUSAN | KODE |    |    |   |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  | Persentase penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase anak terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar | 82.00 %<br>0 %<br>0 % | %                         |   |  |   | Program Rehabilitasi Sosial   | Persentase penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase anak terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar | 06                | 1             | 1      | 06   | 04 |    |   |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak | Persentase korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial   | 100                   | %                         | Pemberian bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat | - Persentase korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial<br>- Persentase anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mendapatkan pelayanan sosial dasar<br>- Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar | Rehabilitasi sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial | - Persentase korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial<br>- Persentase anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mendapatkan pelayanan sosial dasar<br>- Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelatihan ketrampilan<br>- Persentase penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan |  |                   | 06            | 1      | 1    | 06 | 04 | 2 |



| KODE | STRUKTUR ORGANISASI | RENSTRA/RENJA PD |  |               |  |  |        |        | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019  |  |          |                    |         |                   |               |        |      |    |   |
|------|---------------------|------------------|--|---------------|--|--|--------|--------|--|--|----------|--------------------|---------|-------------------|---------------|--------|------|----|---|
|      |                     | KODE             |  | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN   | INDIKATOR  | TARGET | SATUAN | SUB KEGIATAN   | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | BIDANG URUSAN | URUSAN | KODE |    |   |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal | Persentase anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mendapatkan pelayanan sosial dasar | 100,00 | %      | Pemberian bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, Anaka terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat | - Persentase korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial-<br>- Persentase anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mendapatkan pelayanan sosial dasar-<br>- Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar |          |                    |         | 06                | 1             | 1      | 06   | 02 | 2 |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Penanganan Lanjut Usia Terlantar   | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar   | 100,00 | %      | Pemberian bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat  | - Persentase korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial<br>- Persentase anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mendapatkan pelayanan sosial dasar<br>- Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dasar   |          |                    |         | 06                | 1             | 1      | 06   | 02 | 2 |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial   | Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelatihan ketrampilan                                   | 10,00  | %      | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  | - Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelatihan ketrampilan<br>- Persentase penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan  |          |                    |         | 06                | 1             | 1      | 06   | 04 | 2 |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma  | Persentase penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan  | 2,00   | %      | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  | Persentase penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan  |          |                    |         | 06                | 1             | 1      | 06   | 04 | 2 |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                      |  |        |        |  |  |          |                    |         | 06                | 1             | 1      | 06   | 04 |   |

| KO<br>DE | STRUKTUR<br>ORGANISAS<br>I | RENSTRA/RENJA PD |  |                  |  |   |        |         | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019   |   |   |   |  |  |                  |        |      |    |    |   |
|----------|----------------------------|------------------|--|------------------|--|---|--------|---------|---|---|---|---|--|--|------------------|--------|------|----|----|---|
|          |                            | KODE             |  | BIDANG<br>URUSAN | PROGRAM/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR   | TARGET | SATUAN  | SUB KEGIATAN  | INDIKATOR SUB<br>KEGIATAN   | KEGIATAN  | INDIKATOR KEGIATAN  | PROGRAM                                  | INDIKATOR PROGRAM  | BIDANG<br>URUSAN | URUSAN | KODE |    |    |   |
|          |                            |                  |  | SOSIAL           | Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Rumah Singgah                                   | Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dasar | 100,00 | %       | Pemberian bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat | Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dasar | Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | - Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dasar<br>- Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan kesehatan sosial<br>- Jumlah PMKS keluhan, rujukan dan kebutuhan masyarakat terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan |  |  | 06               | 1      | 1    | 06 | 02 | 2 |
|          |                            |                  |  | SOSIAL           | Pelayanan kesehatan sosial bagi PMKS   | Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan kesehatan sosial   | 180,00 | Orang   | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan kesehatan sosial   |   |   |  | 06   | 1                | 1      | 06   | 04 | 2  |   |
|          |                            |                  |  | SOSIAL           | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                              | Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan   | 10,00  | %       |   |   |   |   | Program Pemberdayaan Sosial              | - Presentase keluarga miskin yang mendapat bantuan dan penanganan<br>- Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan | 06               | 1      | 1    | 06 | 02 |   |
|          |                            |                  |  | SOSIAL           | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat                           | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pembinaan                             | 71     | orang   | Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pembinaan                             | Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten/Kota  | - Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pangan-<br>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pembinaan-<br>Jumlah kegiatan pameran yang diikuti -<br>Jumlah Lembaga Sosial yang mendapatkan Bantuan dan Pembinaan   |  |  | 06               | 1      | 1    | 06 | 02 | 2 |
|          |                            |                  |  | SOSIAL           | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat | Jumlah kegiatan pameran yang diikuti  | 1,00   | Kali    | Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial Kelembagaan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah kegiatan pameran yang diikuti  |   |   |  |  | 06               | 1      | 1    | 06 | 02 | 2 |
|          |                            |                  |  | SOSIAL           | Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial                                 | Jumlah Lembaga Sosial yang mendapatkan Bantuan dan Pembinaan                                      | 92     | lembaga | Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial Kelembagaan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Lembaga Sosial yang mendapatkan Bantuan dan Pembinaan                                      |   |   |  |  | 06               | 1      | 1    | 06 | 02 | 2 |
|          |                            |                  |  |                  | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                              | Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan   | 10,00  | %       |   |   |   |   | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan  | 06               | 1      | 1    | 06 | 07 |   |
|          |                            |                  |  | SOSIAL           | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan  | Jumlah ketersediaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan   | 12     | bulan   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   | Jumlah ketersediaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   | - Jumlah ketersediaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan<br>- Jumlah peserta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial  |  |  | 06               | 1      | 1    | 06 | 07 | 2 |

| KODE | STRUKTUR ORGANISASI | RENSTRA/RENJA PD |  |  |               |  |   |               | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 |   |   |  |  |                                    |   |               |          |          |           |           |    |    |
|------|---------------------|------------------|--|--|---------------|--|---|---------------|---------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|---|---------------|----------|----------|-----------|-----------|----|----|
|      |                     | KODE             |  |  | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN   | INDIKATOR   | TARGET        | SATUAN                    | SUB KEGIATAN  | INDIKATOR SUB KEGIATAN  | KEGIATAN   | INDIKATOR KEGIATAN   | PROGRAM                            | INDIKATOR PROGRAM   | BIDANG URUSAN | URUSAN   | KODE     |           |           |    |    |
|      |                     |                  |  |  | SOSIAL        | Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial | Jumlah peserta penanaman nilai-nilai keahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial  | 50,00         | orang                     | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah peserta penanaman nilai-nilai keahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial  |  |  |                                    | 06  | 1             | 1        | 06       | 07        | 2         |    |    |
|      |                     |                  |  |  |               | <b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>               | <b>Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan</b>  | <b>10,00</b>  | <b>%</b>                  |   |   |  |  | <b>Program Rehabilitasi Sosial</b> | <b>Persentase penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase anak terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar</b> | <b>06</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>06</b> | <b>04</b> |    |    |
|      |                     |                  |  |  | SOSIAL        | SLRT (Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu)                                  | Jumlah PMKS keluhan, rujukan dan kebutuhan masyarakat terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan | 91,00         | orang                     | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                    | Jumlah PMKS keluhan, rujukan dan kebutuhan masyarakat terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan | <b>Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b> | <b>- Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dasar - Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan kesehatan sosial - Jumlah PMKS keluhan, rujukan dan kebutuhan masyarakat terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan</b> |                                    |   | 06            | 1        | 1        | 06        | 04        | 2  |    |
|      |                     |                  |  |  |               |  |   |               |                           | Pemberian Layanan Rujukan                               | Jumlah PMKS keluhan, rujukan dan kebutuhan masyarakat terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan |  |  |                                    | 06  | 1             | 1        | 06       | 04        | ##        | 01 |    |
|      |                     |                  |  |  | SOSIAL        | <b>Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</b>                  | <b>Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial</b>  | <b>100,00</b> |                           |   |   |  |  | <b>Program Penanganan Bencana</b>  | <b>Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial</b>  | <b>06</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>06</b> | <b>06</b> |    |    |
|      |                     |                  |  |  | SOSIAL        | Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana                       | Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan bantuan  | 100,00        | KK                        | Pelayanan dukungan Psikososial                          | Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan bantuan  | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>   | <b>Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan bantuan</b>  |                                    |   | 06            | 1        | 1        | 06        | 06        | 2  | 05 |

| KODE | STRUKTUR ORGANISASI | RENSTRA/RENJA PD |  |               |   |  |         | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 |  |  |  |  |   |                            |  |        |      |    |    |    |  |
|------|---------------------|------------------|--|---------------|---|--|---------|---------------------------|--|--|--|--|---|----------------------------|--|--------|------|----|----|----|--|
|      |                     | KODE             |  | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN  | INDIKATOR  | TARGET  | SATUAN                    | SUB KEGIATAN   | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | KEGIATAN   | INDIKATOR KEGIATAN   | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM          | BIDANG URUSAN  | URUSAN | KODE |    |    |    |  |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat                          | Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat                   | 1,00    | Kali                      | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                              | Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat                   | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota  | Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat                   |   | 06                         | 1  | 1      | 06   | 06 | 2  | 01 |  |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Program Bantuan dan Perlindungan Sosial   | Persentase rumahtangga / individu sasaran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial            | 100,00  |                           |  |  |  |  | Program Rehabilitasi Sosial   | 06                         | 1  | 1      | 06   | 05 |    |    |  |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)                           | Persentase penyaluran PKH sesuai ketentuan yang berlaku  | 100,00  | %                         |  | PKH sesuai ketentuan yang berlaku  | Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)  | Persentase penyaluran PKH sesuai ketentuan yang berlaku  | Persentase penyaluran PKH sesuai ketentuan yang berlaku                   | 06                         | 1  | 1      | 06   | -  | -  | -  |  |
|      |                     |                  |  |               | Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar                           | Persentase orang terlantar dan mayat terlantar yang mendapatkan penanganan dan perlindungan sosial | 100,00  | %                         | Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                                    | Persentase orang terlantar dan mayat terlantar yang mendapatkan penanganan dan perlindungan sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase orang terlantar dan mayat terlantar yang mendapatkan penanganan dan perlindungan sosial |   | 06                         | 1  | 1      | 06   | 04 | 2  | 05 |  |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Pendampingan Operasional Bantuan Sosial Pangan                                    | Persentase penyaluran bantuan sosial pangan sesuai ketentuan yang berlaku                          | 100     | %                         |  | Persentase penyaluran bantuan sosial pangan sesuai ketentuan yang berlaku                          |  | Persentase penyaluran bantuan sosial pangan sesuai ketentuan yang berlaku                          | Persentase penyaluran bantuan sosial pangan sesuai ketentuan yang berlaku | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial    % | 06     | 1    | 1  | 06 | 06 |  |
|      |                     |                  |  |               | Pengadaan bahan makanan untuk PMKS  | bantuan bahan makanan  | 1780,00 | orang                     | Penyediaan Makanan   | bantuan bahan makanan  | Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  | bantuan bahan makanan  |   | 06                         | 1  | 1      | 06   | 06 | 2  | 01 |  |
|      |                     |                  |  |               | Pengadaan cadangan gudang untuk pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana | Jumlah cadangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang tersedia                  | 200,00  | Paket                     | Penyediaan Makanan   | Jumlah cadangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang tersedia    Paket         | Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  | Jumlah cadangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang tersedia    Paket         |   | 06                         | 1  | 1      | 06   | 06 | 2  | 01 |  |
|      |                     |                  |  |               |   |  |         | Penyediaan Sandang        | Jumlah cadangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang tersedia    Paket |  |  |  |   | 06                         | 1  | 1      | 06   | 06 | 2  | 02 |  |

| KODE | STRUKTUR ORGANISASI | RENSTRA/RENJA PD |  |               |  |   |        | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 |   |  |  |   |   |   |               |        |      |    |   |    |   |
|------|---------------------|------------------|--|---------------|--|---|--------|---------------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|--------|------|----|---|----|---|
|      |                     | KODE             |  | BIDANG URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN   | INDIKATOR   | TARGET | SATUAN                    | SUB KEGIATAN  | INDIKATOR SUB KEGIATAN   | KEGIATAN   | INDIKATOR KEGIATAN  | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM   | BIDANG URUSAN | URUSAN | KODE |    |   |    |   |
|      |                     |                  |  |               | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin                              |   |        |                           |   |  |  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial   | Persentase rumah tangga/individu sasaran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial    % | 06  | 1             | 1      | 06   | 05 |   |    |   |
|      |                     |                  |  |               | Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin                                  | Jumlah KPM PKH yang mendapatkan pelatihan ketrampilan berusaha                                | 200,00 |                           | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah KPM PKH yang mendapatkan pelatihan ketrampilan    Orang | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah KPM PKH yang mendapatkan pelatihan ketrampilan    Orang                                |   | 06  | 1             | 1      | 06   | 05 | 2 | 02 |   |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Program pelayanan kesehatan penduduk miskin  | prosentase anak dari keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan sunatan masal    %            | 0      |                           | Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti               |  |  |   |   |   |               |        |      |    |   |    |   |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Pelayanan sunatan masal  | Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan sunatan masal    Orang                                 | 0      |                           | Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti               |  |  |   |   |   |               |        |      |    |   |    |   |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial                                       | persentase lembaga keagamaan, lembaga sosial yang difasilitasi bantuan/pembinaan    %         | 84     |                           |   |  |  |   | Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial  | persentase lembaga keagamaan, lembaga sosial yang difasilitasi bantuan/pembinaan    % | 06            | 1      | 1    | 06 | - | -  | - |
|      |                     |                  |  | SOSIAL        | Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan | Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan yang terfasilitasi    Lembaga | 100    |                           |   |  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Hibah Kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan | Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan yang terfasilitasi    Lembaga |   | 06  | 1             | 1      | 06   | -  | - | -  |   |



## PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

### DINAS SOSIAL

Jalan Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Kode Pos 63319

Telepon (0351) 895021 Fax (0351) 895021

E-mail: dinsos@magetan.go.id Web: dinsos.magetan.go.id

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/ /403.107/Kept/2020**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan ketentuan pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. memperhatikan konsideran menimbang pada huruf a perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Magetan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Magetan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : a. Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan koordinasi dalam persiapan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
  2. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
  3. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

- b. Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, khusus Kepala Bidang bertanggung jawab pada bahan dan data Rencana Kerja Tahun 2021 pada bidangnya masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : Februari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN

**YAYUK SRI RAHAYU, SE**  
Pembina  
NIP. 19680508 199302 2 003



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Magetan  
Nomor : 188/ /403.107/Kept/2020  
Tanggal : Februari 2020

---

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2021  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

|      | JABATAN DALAM TIM   | KETERANGAN JABATAN / INSTANSI   |
|------|---|---|
| 1    | 2   | 3   |
| I.   | Penanggung Jawab  | Kepala Dinas  |
| II.  | Ketua   | Sekretaris Dinas  |
| III. | Sekretaris  | Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan   |
| IV.  | Anggota   |   |
|      | 1. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial               | a. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial<br>b. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia<br>c. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial<br>d. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas  |
|      | 2. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial   | a. Kepala Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>b. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial<br>c. Kepala Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>d. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial Masyarakat |
|      | 3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin<br>b. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Dan Pengelolaan Dana Sosial<br>c. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin<br>d. Seksi Kepahlwanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial         |

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN

**YAYUK SRI RAHAYU, SE**  
Pembina  
NIP. 19680508 199302 2 003

